

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarifah Liza Munira

Jabatan : Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Budi G. Sadikin

Jabatan : Menteri Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

**Budi G. Sadikin**

**Syarifah Liza Munira**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN**

No.	Sasaran Strategis/Program/Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A.</b>	<b>Sasaran Strategis (10)</b>		
	<b>Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan preventif</b>	<b>Persentase cakupan kelompok berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan</b>	<b>100</b>
	<b>Program : Pelayanan Kesehatan dan JKN</b>		
1.	Terpenuhinya pembiayaan kesehatan pada kegiatan promotif dan preventif dalam mencapai UHC	1. Persentase penduduk berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan 2. Persentase kabupaten/kota yang memenuhi pembiayaan kegiatan promotif preventif pada SPM	100 75
<b>B.</b>	<b>Sasaran Strategis (11)</b>		
	<b>Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien dan berkeadilan untuk mencapai universal health coverage (UHC)</b>	<b>Proporsi <i>Out Of Pocket</i> (OOP) terhadap total belanja kesehatan</b>	<b>20</b>
2.	Terpenuhinya pembiayaan kesehatan pada kegiatan promotif dan preventif dalam mencapai UHC	1. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) bidang kesehatan	100

No.	Sasaran Strategis/Program/Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>C. Sasaran Strategis (16)</b>			
	<b>Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti</b>	<b>Presentasi kebijakan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan</b>	<b>81</b>
<b>Program : Kebijakan Pembangunan Kesehatan</b>			
3.	Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti	1. Persentase kebijakan teknis dalam penguatan berbagai skema pembiayaan kesehatan yang efektif dan efisien 2. Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti 3. Terbangunnya tatakelola kerjasama internasional yang efektif	100 100 1
<b>D. Sasaran Strategis (17)</b>			
	<b>Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik</b>	<b>Indeks capaian tata Kelola Kemenkes yang baik</b>	<b>90</b>
<b>Program : Dukungan Manajemen</b>			
4.	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai Kinerja Anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan 3. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan 4. Persentase realisasi Anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	98 95 95 96

<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>
1. Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Rp.	17.000.082.000
2. Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Rp.	364.136.251.000
3. Program Dukungan Manajemen	Rp.	81.805.919.000
<b>Total Anggaran DIPA Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan</b>	<b>Rp.</b>	<b>462.942.252.000</b>

Jakarta, 29 Januari 2024

Pihak Kedua,



**Budi G. Sadikin**

Pihak Pertama,



**Syarifah Liza Munira**